



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PATYARINI MEININGSIH RITONGA
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 86001

II. DATA HARTA

- | | | |
|--|------------|----------------------|
| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 2.250.000.000 |
| 1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000 | | |
| 2. Bangunan Seluas 20 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000 | | |
| 3. Tanah dan Bangunan Seluas 758 m2/218 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI , Rp. 1.000.000.000 | | |
| 4. Tanah Seluas 192 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 356.000.000 |
| 1. MOBIL, MITSUBISHI SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000 | | |
| 2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000 | | |
| 3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.0 G A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000 | | |
| 4. MOTOR, KAWASAKI B7175B Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 2.265.600.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | 576.385.807 |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 425.828.084 |



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.873.813.891

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.873.813.891

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.